



PERAN SENTRAL POTENSI GEOGRAFIS TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN KERAJAAN MATARAM ISLAM

¹Risma Margaretha Sinaga, ²Nur Indah Lestari, ³Arini Gita Cahyani, ⁴Anatasia Ramadanti

^{1, 2, 3, 4}Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Lampung, Indonesia

¹risma.margaretha@fkip.unila.ac.id, ²nur.indahlestari@fkip.unila.ac.id,

³arini.gita302819@students.unila.ac.id, ⁴anatasia.ramadanti302619@students.unila.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 22-09-2022

Disetujui: 20-06-2023

Kata Kunci:

Potensi Geografis
Perkembangan Ekonomi
Kerajaan Mataram Islam

Keywords:

*Geographical Potential
Economic Development
Islamic Mataram
Kingdom*

ABSTRAK

Abstrak: Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan bercorak agraris yang dirintis oleh Ki Gede Pemanahan pada abad ke-16 M setelah memisahkan diri dari pemerintahan Kerajaan Pajang. Jauh sebelum Kerajaan Islam dibangun, kawasan ini merupakan kawasan hutan bernama *Alas Mentaok* yang diberikan kepada Sultan Adiwijaya setelah Ki Gede Pemanahan membantu Kerajaan Pajang melawan serangan Arya Penangsang dari Jipang. Sepeninggal Ki Gede Pemanahan, kekuasaan pemerintahan Kerajaan Mataram Islam dipegang oleh Panembahan Senapati dan berhasil mencapai masa kejayaannya ketika dipimpin oleh Sultan Agung. Kerajaan Mataram Islam sebagai kerajaan yang bercorak agraris sangat mengandalkan kegiatan bercocok tanam atau bercocok tanam untuk menjalankan kegiatan ekonomi kerajaan. Oleh karena itu, potensi geografis sangat berpengaruh bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran sentral potensi geografis dalam perkembangan ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sejarah dengan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ditemukan, letak geografis dan potensi sangat mempengaruhi orientasi ekonomi suatu wilayah, tidak terkecuali di Kerajaan Mataram Islam. Wilayah Kerajaan Mataram Islam terletak di daerah pedalaman untuk dijadikan daerah pertanian dengan komoditas yang bervariasi. Selain itu, Kerajaan Mataram Islam terus mengembangkan kegiatan maritim, terutama kegiatan perdagangan dari dalam dengan daerah di luar Jawa.

Abstract: *The Islamic Mataram Kingdom is an agrarian style kingdom which was pioneered by Ki Gede Pemanahan in the 16th century AD after breaking away from the Pajang Kingdom government. Long before the Islamic Kingdom was built, this area was a forest area called Alas Mentaok which was awarded to Sultan Adiwijaya after Ki Gede Pemanahan helped the Pajang Kingdom against the Arya Penangsang attack from Jipang. After the death of Ki Gede Pemanahan, the ruling power of the Islamic Mataram Kingdom was held by Panembahan Senapati and succeeded in reaching its heyday when led by Sultan Agung. The Islamic Mataram Kingdom as an agrarian-style kingdom relied heavily on farming or farming activities to carry out the kingdom's economic activities. Therefore, geographical potential is very influential for the development and economic progress of the Islamic Mataram Kingdom. This study aims to identify and describe the central role of geographic potential in the economic development of the Islamic Mataram Kingdom. In this study, historical research methods were used with data collection carried out by literature study. From the results of the research found, geographical location and potential greatly affect the economic orientation of a region, not least in the Islamic Mataram Kingdom. The territory of the Islamic Mataram Kingdom was located in an inland area to be used as an agricultural area with varied commodities. In addition, the Islamic Mataram Kingdom continued to develop maritime activities, especially trading activities from the interior with areas outside Java.*



<https://doi.org/10.31764/historis.vXIY.9343>
SA license



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license

A. LATAR BELAKANG

Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan Islam yang bercorak agraris yang terletak di pedalaman Pulau Jawa. Mulanya, Kerajaan Mataram Islam didirikan di atas tanah yang dihadiahkan dari Sultan Adiwijaya karena Ki Gede Pemanahan telah berkontribusi ketika Kerajaan Pajang melawan Arya Penangsang dari Jipang. Sebelum didirikan Kerajaan Mataram Islam, tanah tersebut masih berbentuk hutan belantara yang dikenal dengan *Alas Mentaok*. Kerajaan Mataram Islam diperkirakan dibangun selama tujuh tahun dengan pusat pemerintahan yang berada di Kota Gede. Kemudian, Ki Gede Pemanahan dikenal dengan nama Ki Ageng Mataram. Akan tetapi, Mataram belum berdiri sebagai kerajaan tunggal, melainkan masih menjadi bagian dari wilayah kekuasaan dan pemerintahan Kerajaan Pajang. Sepeninggal Ki Gede Pemanahan, kekuasaan pemerintahan diberikan kepada Sutawijaya atau Panembahan Senapati yang bergelar Senapati Ing Alaga Sayidin Panatagama sekitar tahun 1584. Sutawijaya berhasil menjadikan Mataram sebagai Kerajaan Islam yang mempunyai legitimasi secara penuh sehingga dapat mengatur pemerintahan sendiri pada tahun 1578-1588, setelah dilakukannya pemberontakan terhadap Kerajaan Pajang (Zamzami, 2018).

Setelah memerdekakan Kerajaan Mataram Islam, Panembahan Senapati melakukan ekspansi ke berbagai arah, seperti ke arah utara (wilayah pantai) serta ke arah timur (lembah Sungai Madiun dan Sala) pada tahun 1590. Kemudian, terjadi pemberontakan di lembah Sungai Madiun pada tahun 1595 dan berhasil menyelesaikan pemberontakan di Pati pada tahun 1590. Pada tahun 1597, Kerajaan Mataram Islam tidak berhasil menaklukkan daerah Banten. Kerajaan Mataram Islam pun gagal ketika berupaya untuk menaklukkan Tuban sehingga Panembahan Senapati tidak dapat menanamkan hegemoni kekuasaan Kerajaan Mataram Islam di Jawa Timur. Panembahan Senapati dianggap sebagai tonggak pemerintahan awal Kerajaan Mataram yang menerapkan sistem pemerintahan monarkal, yaitu

tidak memerlukan kontribusi dari penyelenggara-penyelenggara dalam pemerintah dalam bidang hukum, pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan pengumpulan upeti dari rakyat (Zamzami, 2018).

Kekuasaan Panembahan Senapati di Kerajaan Mataram Islam digantikan oleh putranya pada tahun 1619 yang bernama Raden Mas Jolang. Pada saat itu, Jawa Timur sangat dipengaruhi oleh kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Ketika Penguasa Agung memerintah, Kerajaan Mataram Islam terlibat peperangan dengan VOC. Setelah itu, pada tahun 1630, Amangkurat I menjadi putra mahkota kerajaan (Iswanto, 2021). Kerajaan Mataram Islam berhasil sampai pada masa keemasannya pada masa kepemimpinan Sultan Agung. Kerajaan Mataram Islam telah menguasai hampir seluruh wilayah di Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia pada tahun 1640. Banten dijadikan sebagai target ekspansi selanjutnya dikarenakan menolak untuk mengakui kekuasaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa, sedangkan ekspansi ke Batavia didasarkan atas penolakan VOC dalam membantu Sultan Agung ketika menyerang Surabaya (Siswanta, 2019).

Sultan Agung atau dikenal dengan nama Raden Mas Rangsang merupakan raja ketiga yang memimpin Kerajaan Mataram Islam, tepatnya dalam kurun tahun 1613-1645. Sultan Agung memiliki gelar Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrakusuma yang membangun Kerajaan Mataram Islam menjadi kerajaan terbesar di Pulau Jawa. Bahkan, Sultan Agung dijadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden No. 106/TK/1975 pada tanggal 3 November 1975. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, VOC mulai mendatangi wilayah Nusantara. Selain itu, Kota Surabaya dikepung oleh pasukan-pasukan Mataram yang menyebabkan terjadinya peperangan. Kerajaan Mataram Islam terlibat peperangan dengan VOC yang terjadi dalam dua kali serangan. Serangan pertama dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa yang ditujukan untuk melumpuhkan Benteng Holandia, tetapi mengalami kekalahan telak. Serangan kedua dipimpin oleh Adipati Ukur yang membuat Sungai Ciliwung

menjadi kotor sehingga menyebabkan timbulnya wabah penyakit kolera di Batavia yang menewaskan J. P. Coen yang pada saat itu menduduki kursi Gubernur Jenderal VOC (Murdiyastomo & Aman, 2015).

Sultan Agung menghadapi beberapa hambatan dalam masa kepemimpinannya di Kerajaan Mataram Islam, yaitu ancaman perpecahan Jawa Tengah dan Surabaya semakin berkembang menjadi wilayah yang memiliki perekonomian yang kuat dengan jaringan perdagangan yang besar. Kerajaan Mataram Islam berseteru dengan Banten yang telah dimulai sejak pendirian dua kerajaan ini. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, ekspansi untuk memperluas legitimasi kekuasaan semakin digalakkan. Strategi yang digunakan, yaitu meningkatkan tatanan keprajuritan yang terstruktur dengan baik di lingkup pusat maupun daerah. Adanya kekuatan militer yang kuat, Sultan Agung berhasil menaklukkan berbagai wilayah secara berturut-turut yang meliputi Lenong, Malang, dan Lumajang pada tahun 1614, Wirasaba pada tahun 1615, Lasem pada tahun 1616, Pasuruan pada tahun 1617, serta Tuban pada tahun 1619. Sementara itu, penaklukan atas Surabaya dilakukan pada tahun 1620-1626 menggunakan strategi kepung, membendung aliran Sungai Brantas, dan menghancurkan panen (Munawar, 2020).

Kesultanan Mataram berperan sentral dalam kronologi yang berkelanjutan dari kerajaan-kerajaan Islam di seluruh Nusantara. Hal ini tercermin dari cita-cita para raja untuk memperbesar wilayah dan mengislamkan rakyatnya, serta keterlibatan para penghulu atau pemuka agama dalam eskalasi budaya ala Islam yang tersebar di berbagai wilayah Jawa. Sistem Dewa-Raja adalah sistem kekuasaan dalam politik dan pemerintahan yang digunakan oleh kerajaan Mataram Islam. Artinya, sultan merupakan pusat kekuasaan dengan kewenangan tertinggi dan tidak dapat diganggu gugat. Seorang sultan atau raja sering dianggap sebagai perwujudan orang yang suci. Peran ulama lebih terfokus pada mengislamkan tradisi atau kebiasaan yang masih melekat kuat di hati masyarakat Mataram. Sunan Kalijaga adalah seorang wali atau ulama yang secara ulet dan bekerja keras untuk memastikan bahwa ajaran Islam mudah diyakini oleh orang-orang yang telah mendarah daging keyakinan mereka sebelum kedatangan Islam (Siswanta, 2019).

Di Kerajaan Mataram Islam, sistem ketatanegaraan dibedakan menjadi beberapa bagian. Pertama, *kutagara* atau *kutanegara* merupakan ibukota atau pusat pemerintahan kerajaan yang berfungsi sebagai kediaman raja beserta keluarganya. Kedua, bumi narawita berfungsi sebagai kediaman kalangan bangsawan kerajaan yang mengabdikan kepada raja. Ketiga, *nagara agung* atau negara agung merupakan daerah inti yang berfungsi sebagai tanah *lugguh* yang dimiliki kalangan bangsawan kerajaan. Keempat, *mancanegara* merupakan kawasan yang berada di luar *nagara agung*, yaitu *mancanegara wetan* (Ponorogo ke timur), *mancanegara kulon* (Purworejo ke barat), *pepikiran* (sepanjang pantai utara Jawa), *pepikiran kulon* (Demak ke barat), dan *pepikiran wetan* (Demak ke timur) (Sapto, 2015).

Pepikiran merupakan konsep yang memiliki makna sebagai daerah yang berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram Islam sejak periode Sultan Agung memerintah. Wilayah *pepikiran* mengindikasikan adanya hubungan antara penguasa dan daerah yang bersifat rasional. Kerajaan Mataram Islam mengawasi wilayah-wilayah pesisir dengan menempatkan orang-orang kepercayaan. Selain itu, dilaksanakan kunjungan wajib secara berkala yang disebut *pisowan* melalui utusan-utusan dari kerajaan. Sebelum penaklukan yang dilakukan oleh Kerajaan Mataram Islam, wilayah-wilayah pesisir merupakan kekuasaan politik dan ekonomi yang berdiri sendiri sehingga menjadi sarana yang menghubungkan jaringan perdagangan dari wilayah pedalaman dengan wilayah luar Pulau Jawa. Setelah penaklukan yang dilakukan oleh Kerajaan Mataram Islam, kegiatan perdagangan di wilayah pesisir menjadi terbatas dan diwajibkan untuk mendapatkan izin dari kerajaan pusat atau yang mewakili Kerajaan Mataram Islam (Hartatik, 2016).

Wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam membentang dari Blambangan (sekarang Banyuwangi) di bagian ujung Pulau Jawa bagian barat dan daerah-daerah di luar Pulau Jawa, seperti Banjarmasin, Makassar, Sukadana, dan Palembang. Sebagian besar pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam terletak di wilayah pedalaman sehingga pertanian menjadi permasalahan kehidupan yang sangat penting untuk menopang kehidupan kerajaan maupun rakyat. Pertanian menjadi ladang perekonomian utama di Kerajaan

Mataram Islam. Akan tetapi, tetap dikembangkan kegiatan niaga atau perdagangan untuk menunjang seluruh keberlanjutan perekonomian rakyat yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan (Suryani, 2021).

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahas secara mendetail mengenai peran sentral potensi geografis terhadap perkembangan perekonomian Kerajaan Mataram Islam. Di dalam tulisan ini, terdapat aspek yang menarik karena penelitian mengenai geografi sejarah belum banyak dilakukan pengkajian sehingga relatif sulit ditemukan apabila digunakan sebagai sumber-sumber ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penulis akan berupaya memaparkan secara menyeluruh mengenai peran sentral potensi geografis terhadap perkembangan perekonomian Kerajaan Mataram Islam yang bercorak agraris sehingga mengutamakan pertanian sebagai kegiatan perekonomian utamanya. Oleh karena itu, penulis memilih judul "Peran Sentral Potensi Geografis terhadap Perkembangan Perekonomian Kerajaan Mataram Islam.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Definisi studi kepustakaan, yaitu metode yang menggunakan sumber kepustakaan yang ada dan memiliki kesesuaian dengan penulisan, kemudian data yang ditemukan akan diolah dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah dipilih oleh penulis, yaitu metode penelitian sejarah atau historis yang meliputi empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Zuhdi, 1996).

Langkah awal yang dilakukan dalam metode penelitian sejarah, yaitu heuristik atau penghimpunan sumber-sumber data yang memiliki kesesuaian atau relevan dengan judul yang sedang ditulis oleh penulis. Pada tahap ini, penulis dianjurkan untuk mengumpulkan sumber sebanyak dan sevariatif mungkin. Dalam pencairan dan pengumpulan sumber ini, penulis dapat mengumpulkan sumber dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada masa globalisasi yang selalu berkembang ini, seperti dengan perpustakaan serta media elektronik yang dapat mempermudah dalam kegiatan pengumpulan

sumber-sumber yang absah dan sesuai dengan judul penelitian yang sedang dikaji (Sugiyanto, 2010).

Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan dalam penulisan adalah jurnal-jurnal dan buku yang menggambarkan serta menjelaskan tentang peran sentral potensi geografis terhadap perkembangan perekonomian Kerajaan Mataram Islam. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan berisi mengenai seluk-beluk perkembangan perekonomian Kerajaan Mataram Islam yang didukung oleh potensi geografis yang dimiliki. Literatur yang telah dipilih ini menjadi pelengkap dan penguat informasi yang terdapat dalam penelitian ini.

Selanjutnya, yaitu tahap kritik di mana ketika penulis sudah berhasil mengumpulkan berbagai sumber dengan sebanyak-banyaknya maka dapat dilakukan tahap kritik. Di dalam tahap ini, penulis harus mengkritik sumber dengan baik dan benar, agar sumber yang berhasil didapat benar-benar mengarah, memiliki makna yang konkret, serta memberikan nilai-nilai objektif. Tahap kritik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Pertama, kritik intern bertujuan untuk mengkaji isi sumber-sumber otentik sehingga dapat mengetahui kevalidan makna yang terkandung di dalamnya melalui bahasa, gaya, situasi, dan pemikiran. Kedua, kritik ekstern bertujuan untuk mengidentifikasi dan menelaah mengenai autentisitas terhadap identitas pembuat, bentuk sumber, dan waktu dikeluarkannya dalam sumber-sumber sejarah yang berhasil didapatkan. Kemudian, penulis membandingkan atau memadankan antara satu data dengan data lainnya.

Kemudian, tahap yang harus dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan tahap interpretasi atau penafsiran. Interpretasi merupakan kegiatan menginterpretasi, kemudian menghubungkan sumber satu dengan sumber relevan lainnya yang telah dikumpulkan. Setelah keabsahan dan kemurnian sumber yang dievaluasi ditetapkan, fakta-fakta yang ada dihimpun ke dalam satu kesatuan untuk menghasilkan ikatan peristiwa sejarah yang substansial. Di dalam interpretasi, diperlukan analisis hubungan antar fakta-fakta sejarah. Apabila dirasa sumber sudah mencukupi dan sudah relevan, maka tahap selanjutnya adalah tahap penulisan ulang sejarah atau merekonstruksi yang sering disebut dengan tahap historiografi.

Historiografi adalah tahap terakhir yang memiliki makna sebagai upaya dalam menyusun ulang peristiwa sejarah yang sedang diteliti oleh penulis itu sendiri berdasarkan fakta-fakta sejarah yang berhasil didapatkan dan telah diinterpretasi. Data-data yang relevan tersebut di satukan agar menjadi satu kesatuan yang selaras dan memiliki gambaran peristiwa masa lampau yang memiliki keterkaitan waktu yang runtut dari suatu peristiwa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerajaan Mataram Islam yang pada awalnya merupakan sebuah daerah yang berada di kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Kerajaan ini berdiri dengan nama Kerajaan Mataram yang pada awal terbentuknya dengan cara Ki Gede Pemanahan berhasil memukul mundur Arya Penangsang saat sedang terjadinya peperangan. Kesuksesan besar ini kemudian membuat Ki Gede Pemanahan memiliki *Alas Mentaok* yang di jelaskan sebagai hadiah memenangkan perang tersebut yang di berikan langsung oleh Sultan Adiwijaya. *Alas Mentaok* ini adalah hutan yang sangat lebat di dalamnya dan ditumbuhi tumbuhan tropis. Pada masa kepemimpinan Raden Mas Rangsang, ia dinyatakan sebagai Raja Mataram Islam keempat dan diakui sebagai raja terhebat di Mataram yang memiliki beberapa gelar, yaitu sebagai Panembahan Hanyakrakusuma, Prabu Pandita, atau Susuhan Agung Hanyakrakusuma. Pada masa kepimpinannya, daerah kepulauan besar yakni Jawa bisa dikuasai. Ia juga melakukan perpindahan daerah ibukota Mataram menjadi daerah Karta atau Kerta. Pada awalnya, ibukota Mataram adalah Kota Gede yang berada di daerah Jawa Tengah di bagian selatan. Banyak berita yang menjelaskan bahwasanya perpindahan ibu kota ke daerah selatan dengan alasan berdekatan dengan pantai selatan (Mansur, 2004).

Perpindahan ibukota kerajaan dari kawasan pesisir menuju ke pedalaman dipengaruhi oleh tradisi dan kebudayaan sebelumnya sehingga ajaran Islam mengalami akulturasi yang melahirkan ajaran Islam Kejawen (Siswanta, 2019). Sepanjang sejarahnya, Kerajaan Mataram Islam, kemudian dikenal sebagai Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang beribukota di Kota Gede yang berjarak sekitar 6 kilometer di wilayah selatan Yogyakarta. Sekitar 70 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1648,

ibukota dipindahkan ke Kartasura di sebelah timur Kota Gede. Kartasura dan Kota Gede berjarak 70 kilometer. Kemudian, ibukota Kerajaan Mataram Islam kembali dipindahkan dari Kartasura menuju ke Surakarta pada tanggal; 20 Februari 1746. Sentral Kerajaan Mataram Islam merupakan jaringan sejarah terbentuknya kota-kota besar di Pulau Jawa yang mengembangkan kehidupan masyarakat dalam ajaran Islam yang semakin meluas (Murdiyastomo & Aman, 2015).

Ketika Sultan Agung memimpin Kerajaan Mataram Islam, masyarakat yang mendiami daerah ini memiliki pekerjaan dan mata pencaharian yang sangat beragam, misalnya petani, pengrajin, tentara, peternak, pejabat, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, di Kerajaan Mataram Islam terdapat banyak pendatang dari luar atau penduduk asing yang menetap dan melakukan transaksi jual beli dan lain sebagainya. Hal ini membuat mata pencaharian Kerajaan Mataram Islam amat sangat beragam. Akan tetapi, mata pencaharian masyarakat di dominasi pada bidang pertanian. Hal tersebut disebabkan Kerajaan Mataram Islam memiliki sifat geografis dan apabila dilihat dari letak geografisnya, kerajaan ini berada pada daerah pedalaman Jawa Tengah yang memiliki peluang bercocok-tanam untuk para petani sangat besar. Dibuktikan dengan kerajaan ini memiliki gerbang yang melalui pintu Gerbang Selimbi, gerbang ini menyediakan lahan persawahan yang memiliki luas tak sedikit dan memiliki potensi yang sangat besar, kemudian kawasan persawahan ini memiliki pemandangan indah yang dapat menyejukkan mata. Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan yang dapat dikatakan sebagai kerajaan padat masyarakatnya, dapat dilihat dari jumlah kepala keluarganya berjumlah lebih dari 100 kepala keluarga, bahkan ada yang menyentuh angka 150 kepala keluarga. Hal ini dapat terjadi akibat faktor alam yang juga mendukung dengan tersedianya air yang melimpah ruah. Memiliki air yang berlimpah dan faktor alam yang mendukung maka sektor pertanian merupakan pionir pendukung pembangunan yang penting pada masa ini, tetapi tidak hanya pertanian, sektor perdagangan berperan sebagai salah satu penunjang sebagian besar pemasukan Kerajaan Mataram Islam, kemudian dengan daerah Jepara yang menjadi pelabuhan utama mendukung keberlangsungan

kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Kerajaan Mataram Islam (Suryani, 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat banyaknya kepala keluarga yang berada di Kerajaan Mataram Islam ini. Masyarakat di kerajaan Mataram Islam, rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai petani. Ditinjau dari perspektif geografis, maka Kerajaan Mataram Islam berada di daerah Jawa bagian tengah yang berada di wilayah pedalamannya sehingga daerah ini bercorak agraris. Kerajaan Mataram Islam memiliki kawasan persawahan yang luas dan besar. Surakarta sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam mempunyai curah hujan yang cukup dengan karakteristik tanah yang sangat subur apabila digunakan untuk membudidayakan tanaman padi (Pranata, 1977).

Selain kegiatan mengolah tanah dan bercocok tanam, perdagangan menjadi bidang krusial yang memiliki peran sentral dalam pemenuhan kebutuhan pakaian dan pangan bagi penduduk yang mendiami Kerajaan Mataram Islam. Kegiatan komersial marak di berbagai desa di seluruh Kerajaan Mataram Islam. Desa Kerta tumbuh menjadi ibu kota kerajaan, kota padat penduduk yang berkembang pesat. Di dalam kerajaan, masih terdapat pasar tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan, baik di dalam maupun di luar kerajaan. De Haan melihat sebuah gerobak penuh beras dan barang-barang lainnya menuju pasar Kerta saat ia melakukan perjalanan dari Pingit ke pusat kerajaan. Pasar Kerta adalah pasar yang ramai dan dinamis dengan aktivitas yang tiada henti. Memang, para pedagang dari luar kota, seperti yang berasal dari Jawa tengah, barat, dan timur, mengunjungi Desa Kerta, meski harus menempuh perjalanan dua bulan melalui hutan-hutan (Munawar, 2020).

Melalui Pelabuhan Jepara yang menjadi jalur utama Kerajaan Mataram Islam, juga memberikan dampak besar dalam proses jual beli yang dilakukan dalam skala besar maupun skala kecil yang melakukan transaksi melalui pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki oleh bagian daerah Jawa bagian utara. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya Kerajaan Mataram Islam menghasilkan komoditas pertanian dalam jumlah besar, terutama hasil padinya. Kemudian, tidak hanya beras, Kerajaan Mataram Islam dapat mengeksport hasil pertanian lainnya, seperti rotan dan kayu *wungle*. Tidak hanya itu,

Kerajaan Mataram Islam juga melakukan transaksi jual beli dengan mengimpor permata, merica, keramik, porselen, hingga mengimpor kanon atau meriam yang digunakan sebagai senjata (Moerton, 1985).

Pada masa pemerintahan Sultan Agung, masyarakat memiliki mata pencaharian yang bervariasi, seperti petani, peternak, pengrajin, tentara, dan lain-lain. Selain masyarakat lokal, Kerajaan Mataram Islam dihuni oleh orang-orang China yang datang ketika berdagang. Terdapat sistem stratifikasi masyarakat yang terdiri dari *wong gede* dan *wong cilik*. *Wong gede* merupakan sebutan bagi golongan pada tingkatan atas yang memerintah. Sementara itu, *wong cilik* merupakan golongan pada tingkatan bawah yang diperintah. Golongan tertinggi di Kerajaan Mataram Islam didominasi oleh kalangan bangsawan kerajaan dan pejabat tinggi. Seseorang yang memiliki hubungan darah dengan raja, maka dapat mempunyai status sosial yang tinggi. *Wong gede* mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan *wong cilik* karena terdapat perbedaan tegas antara raja sebagai pusat kekuasaan dengan rakyat biasa sebagai kalangan bawah yang menerima perintah-perintah dari *wong gede* (Munawar, 2020).

Mayoritas rakyat menekuni profesi sebagai petani karena ditinjau dari segi geografis, Kerajaan Mataram Islam memiliki area persawahan yang luas. Pengelolaan kegiatan perekonomian di Kerajaan Mataram Islam dilakukan oleh para pejabat dari tingkat pusat hingga daerah dengan mengatur masing-masing daerah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Di kawasan *kutagara*, pajak dikelola secara langsung oleh raja, kemudian dimasukkan ke dalam perbendaharaan di lingkup kerajaan. Di kawasan negara agung, pajak akan dikumpulkan oleh bekel atau kepala desa, kemudian diberikan kepada atasannya (demang, bupati, wedana, dan patih) yang dipantau secara langsung raja yang berkuasa. Kemudian, di kawasan mancanegara dan *pesisiran*, pajak dikendalikan oleh wedana dan bupati (di kawasan mancanegara bergelar Tumenggung atau Raden Arya, sedangkan di kawasan *pesisiran* bergelar Syahbandar). Selain kebijakan pajak, ditetapkan besaran atau kisaran pajak yang wajib diberikan kepada Kerajaan Mataram Islam. Terdapat beberapa pajak yang harus

dibayarkan oleh rakyat yang bersangkutan, yaitu pajak untuk penduduk, pajak untuk tanah, pajak untuk bea cukai barang dan jasa, serta pajak upeti (Munawar, 2020).

Adapun kebijakan ekonomi dan kebudayaan pada periode Sultan Agung berkuasa dilakukan pemindahan penduduk dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Barat (Karawang). Di daerah Karawang, terdapat kawasan sawah dan ladang yang sangat subur sehingga dapat dikembangkan oleh masyarakat. Selain itu, pemindahan penduduk bertujuan untuk mengakulturasikan tradisi Islam dengan Hindu, seperti diadakan *grebeg* dalam rangka memperingati hari besar keagamaan, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri, dan Idul Adha. Akan tetapi, perdagangan maritim yang dibangun oleh Kerajaan Mataram Islam semakin melemah yang diakibatkan oleh dominasi pemerintah Hindia Belanda (Nisa, 2021). Kerajaan Mataram Islam tidak memiliki dasar-dasar untuk mengembangkan kehidupan maritim yang besar. Pantai yang berada di laut selatan Pulau Jawa memiliki karakteristik gelombang ombak yang terlalu kuat dan besar sehingga Kerajaan Mataram Islam sulit berkembang menjadi kerajaan Islam yang bercorak maritim, bahkan pusat pemerintahannya dipusatkan di daerah pedalaman (Muljana, 2007).

Kerajaan Mataram Islam memiliki penduduk yang cukup padat, tetapi tidak sekaya kerajaan di wilayah pesisir sebagai penerus Kerajaan Majapahit. Seiring berjalannya waktu, upaya pembangunan mulai didasarkan pada aspek kontinental atau daratan. Apabila rakyat menguasai wilayah lautan dan memfokuskan kehidupannya pada perekonomian berbasis kelautan, maka rakyat akan memiliki sikap yang lebih terbuka, menyukai tantangan, dan berjiwa bebas. Selain itu, jiwa kewirausahaan akan tumbuh dalam diri rakyat (Diposaptono, 2017). Diterapkan berbagai kebijakan untuk mempertahankan stabilitas pemerintahan dalam kerajaan. Terdapat beberapa kebijakan perekonomian yang diterapkan di Kerajaan Mataram Islam. Pertama, kebijakan pendistribusian tanah yang diatur oleh raja. Tanah dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tanah narawita yang berada di bawah kekuasaan raja secara langsung. Tanah narawita hanya ditujukan untuk pertanian di kalangan kerajaan. Selain itu, terdapat beberapa bidang yang digunakan untuk memmanifestasikan

minyak, bunga, rumput, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh penghuni kerajaan (Suryani, 2021).

Kedua, tanah lungguh (*apanage*) merupakan tanah-tanah yang dimiliki oleh para pejabat tinggi kerajaan dan bangsawan sebagai gaji atas pekerjaannya di pemerintahan. Tanah lungguh terdapat di kawasan negara agung dan *pesisiran* yang dikelola oleh bupati atau raja. Ketiga, tanah perdikan yang terletak di desa dan tempat dibangunnya tempat ibadah, makam, dan lain-lain. Tanah perdikan tidak dikenakan pajak yang diberikan kepada para penghulu dan ulama. Selain itu, penduduk diatur berdasarkan kepemilikan tanah yang berdasarkan pada raja sehingga muncullah pemikiran feodal. Tata Kelola tanah merupakan wewenang dari aparat birokrat dan bangsawan sehingga pertanian dapat berjalan dengan baik sebagai sumber perekonomian. Perekonomian yang baik mencerminkan pemerintahan yang terjamin. Para petani dan prajurit diberikan pembinaan untuk menunjang kesuksesan program intensifikasi serta wajib militer dengan membentuk suatu forum komunikasi. Pembahasan mengenai pertanian umumnya berkaitan dengan pemererat kerja sama antara petani, tata kelola tanah, dan pemakaian modal, sedangkan pembahasan mengenai wajib militer umumnya bertautan erat dengan taktik peperangan dan penggunaan berbagai senjata untuk menjaga keamanan internal maupun eksternal Kerajaan Mataram Islam. Selain itu, kebijakan wajib militer dapat menambah wawasan kemiliteran bagi masyarakat (Suryani, 2021).

Mataram Islam berkembang menjadi kerajaan terbesar di Pulau Jawa dengan optimalisasi potensi agraris dan maritim. Kerajaan Mataram Islam mengeksplor komoditas beras terbesar pada masanya. Selain itu, perdagangan maritim dilakukan dengan penguasaan wilayah-wilayah pesisir yang dijadikan sebagai pelabuhan di pantai utara Jawa. Harmonisasi antara aspek agraris dan maritim mewujudkan Kerajaan Mataram Islam memegang posisi yang kokoh dalam gelanggang perpolitikan di Nusantara. Pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki oleh Kerajaan Mataram Islam kerap kali didatangi oleh para pedagang yang berasal dari Maluku dan Malaka. Sementara itu, pemerintah kolonial Belanda berupaya memonopoli perdagangan pala dan cengkeh di Kerajaan Mataram Islam dengan memindahkan pusat kekuasaan pemerintahan,

perekonomian, dan kebudayaan dari wilayah pesisir menuju ke pedalaman. Komoditas-komoditas pertanian dari Kerajaan Mataram Islam menjadi sama pentingnya dengan rempah-rempah yang berasal dari Maluku. Apabila Kerajaan Mataram Islam menghentikan ekspor beras, maka akan mempengaruhi perdagangan rempah-rempah, baik bagi Maluku maupun pemerintah Hindia Belanda (Vlekke, 2008).

Politik ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam yang diimplementasikan oleh Sultan Agung dapat menambah jumlah lahan pertanian sebagai sumber penghasilan primer dan kekayaan kerajaan. Penguasaan atas wilayah-wilayah baru akan mendatangkan sumber daya manusia sehingga dapat menambah tenaga kerja dan meningkatkan kedudukan raja dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Kerajaan Mataram Islam berfokus mengembangkan kegiatan pertanian yang didasarkan pada potensi agrarisnya. Beras sebagai komoditas unggulan dijadikan sebagai sumber energi, alat politik, dan komoditas perdagangan. Adapun kemajuan-kemajuan di bidang perekonomian yang berhasil dicapai oleh Kerajaan Mataram Islam sebagai berikut.

1. Mampu mempercepat atau meningkatkan jumlah produksi komoditas beras dengan mengoptimalkan potensi sungai-sungai di Pulau Jawa sebagai sarana pengairan atau irigasi untuk mengairi area persawahan.
2. Mampu mengadakan migrasi dari daerah yang kurang potensial dijadikan sebagai area persawahan ke daerah yang subur akan tanahnya dengan sistem irigasi yang merata.
3. Mampu mengintegrasikan kerajaan-kerajaan di wilayah pesisir Pulau Jawa dengan mengandalkan kewenangan ekonomi (agraris dan maritim) serta politik (Murdiyastomo & Aman, 2015).

Perekonomian merupakan salah satu faktor sentral untuk mempertahankan kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Pengetahuan ekonomi yang berbasis agraris dengan mengutamakan sektor pertanian menjadi sumber primer penghasilan bagi kerajaan. Ekspansi untuk memperluas kekuasaan sangat penting untuk dilakukan dari waktu ke waktu sehingga menjadi aspek mutlak yang difokuskan

untuk mencapai kepentingan politik maupun perekonomian. Kemudian, mulai diimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang dan menjaga kestabilan ekonomi, baik dalam lingkup pertanian, moneter, dan fiskal. Kebijakan pertanian diwujudkan dengan membentuk forum komunikasi yang beranggotakan para petani sehingga dapat meningkatkan produktivitas panen. Kebijakan moneter diwujudkan dengan membentuk lembaga keuangan yang mengatur perputaran dan peredaran pendapatan kerajaan. Sementara itu, kebijakan fiskal diwujudkan dengan menempatkan para pejabat-pejabat yang mengatur perpajakan yang dibebankan kepada rakyat beserta besaran dan jenisnya

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, dapat ditarik sebuah intisari bahwa potensi geografis berperan sentral terhadap perkembangan perekonomian Kesultanan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam memiliki sifat geografis dan apabila dilihat dari letak geografisnya, Kerajaan Mataram Islam berada pada daerah pedalaman Jawa Tengah yang memiliki peluang bercocok-tanam untuk para petani sangat besar karena kondisi tanah yang subur. Pusat pemerintahan yang berada di wilayah pedalaman menyebabkan Kerajaan Mataram Islam tidak memiliki dasar-dasar yang kuat menjadi kerajaan maritim. Di pantai laut selatan Pulau Jawa akibat gelombang ombak yang terlalu kuat intensitasnya sehingga Kerajaan Mataram Islam sulit berkembang menjadi kerajaan bernuansa maritim. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya Kerajaan Mataram Islam menghasilkan komoditas pertanian dalam jumlah besar, terutama hasil berasnya yang melimpah. Kemudian, tidak hanya beras yang menjadi komoditas unggulan, Kerajaan Mataram Islam dapat mengekspor hasil-hasil pertanian lainnya, seperti rotan dan kayu *wungle*. Pengelolaan kegiatan perekonomian di Kerajaan Mataram Islam dilakukan oleh para pejabat birokrasi dari tingkat pusat hingga daerah dengan mengatur masing-masing daerah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan keberlanjutan perekonomian Kerajaan Mataram Islam, yaitu penetapan pajak-pajak bagi masyarakat, pemindahan penduduk dari wilayah Jawa Tengah

menuju ke Jawa Barat (Karawang), dan pendistribusian tanah-tanah yang diatur oleh raja

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen, serta Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung atas bimbingan dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik serta sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

REFERENSI

- Diposaptono, S. (2017). *Membangun Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Tata Ruang Laut*. Perpustakaan Nasional.
- Hartatik, E. S. (2016). Perkembangan Jalan Raya di Pantai Utara Jawa Tengah Sejak Mataram Islam Hingga Pemerintahan Daendels. *Paramita: Historical Studies Journal*, 26(2), 155-165.
- Iswanto, J. (2021). Pertumbuhan Institusi Sosial Politik Samudra Pasai, Malaka, Banten, dan Mataram. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 2(1), 38-49.
- Mansur. (2004). *Peradaban Islam dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Moertono, S. (1985). *Negara dan Usaha Bina-Negara: Studi Tentang Mataram II, Abad XVI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muljana, S. (2007). *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Munawar, Z. (2020). Pengelolaan Pajak di Kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung, 1613-1645 M. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(1), 10-23.
- Murdiyastomo, H. Y., & Aman. (2015). Pengembangan Maket Pusat-pusat Pemerintahan Kerajaan Mataram Islam sebagai Alternatif Media Pembelajaran Sejarah. *NOSARARA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(1), 1-29.
- Nisa, I. N. (2021). Historiositas Penanggalan Jawa Islam. *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, 5(1), 1-28.
- Pranata. (1977). *Sultan Agung Hanyakrakusumo*. Jakarta: PT. Yudha Gama Corp.
- Sapto, A. (2015). Pelestarian Kekuasaan pada Masa Mataram Islam: Sebha Jaminan Loyalitas Daerah terhadap Pusat. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 9(2), 153-161.
- Siswanta. (2019). Sejarah Perkembangan Mataram Islam Kraton Plered. *Karmawibangga: Historical Studies Journal*, 1(1), 33-42.
- Sugiyanto. (2010). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jember: Universitas Jember Press.
- Suryani, M. (2021). Perkembangan dan Kebijakan Perekonomian Kerajaan Mataram pada Masa Pemerintahan Sultan Agung. *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 14(2), 206-217.
- Vlekke, S. (2008). *Nusantara Sejarah Indonesia*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Zamzami, R. (2018). Sejarah Agama Islam di Kerajaan Mataram pada Masa Panembahan Senapati, 1528-1601. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2(2), 154-165.
- Zuhdi, S. (1996). Historiografi dan Metodologi Sejarah. *Buletin Al-Turas*, 2(2), 61-68.